



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KEMLAGI

Jalan Raya Kemlagi, Nomor 308 Telp. (0321) 363415

K E M L A G I

KEPUTUSAN CAMAT KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45 / 21 / 416-315 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEMLAGI TAHUN 2026**

CAMAT KEMLAGI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Kemlagi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KEMLAGI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KEMLAGI KAB. MOJOKERTO TAHUN 2026.

- KESATU** : Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto Tahun 2026, selanjutnya disebut dengan Renja Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2026
- KEDUA** : Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Kab. Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

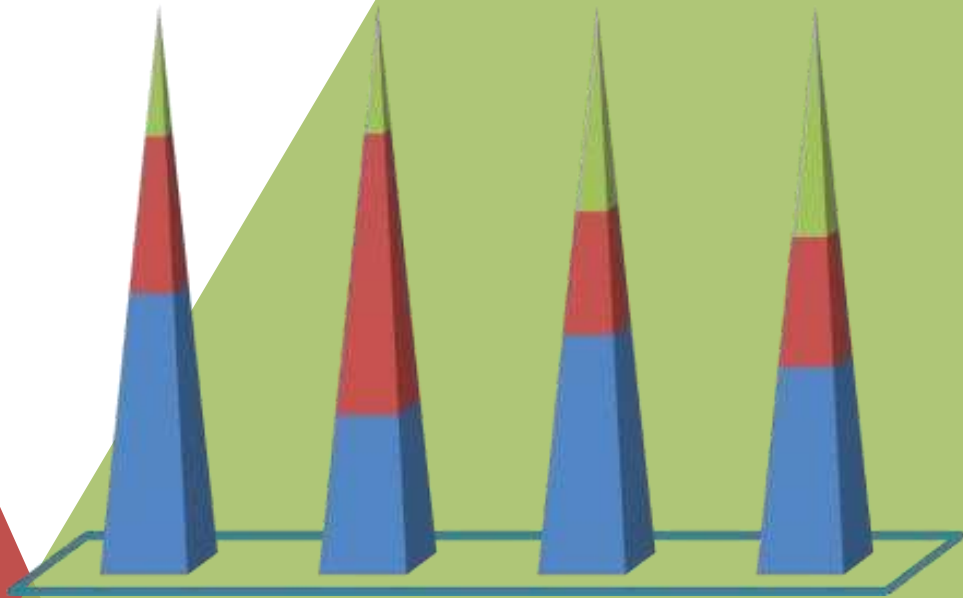
Pada tanggal : 15 Desember 2025

Plt. CAMAT KEMLAGI



MICKY SOCRATES

RENCANA KERJA KECAMATAN KEMLAGI TAHUN 2026



**Jl. Raya Kemlagi No.308, Kemlagi Kidul, Kemlagi, Kec.
Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61353 Telp.
(0321) 363415 Fax**

Website : <http://kemlagi.mojokertokab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 dapat tersusun. Rancangan Akhir Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kemlagi pada tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Mojokerto, serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Rancangan Akhir Renja ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kemlagi melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dan terukur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini, terutama kepada:

- Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas bimbingan dan arahannya.
- Perangkat daerah terkait atas kerjasama dan partisipasinya.
- Tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Kemlagi atas dukungan dan doanya.

Semoga Rancangan Akhir Renja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kemlagi dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Mojokerto, Desember 2025

Plt. Camat Kemlagi



NICKY SOCRATES, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 198404252003121001

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan... ..	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUSI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..	41
BAB V PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANKIR RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

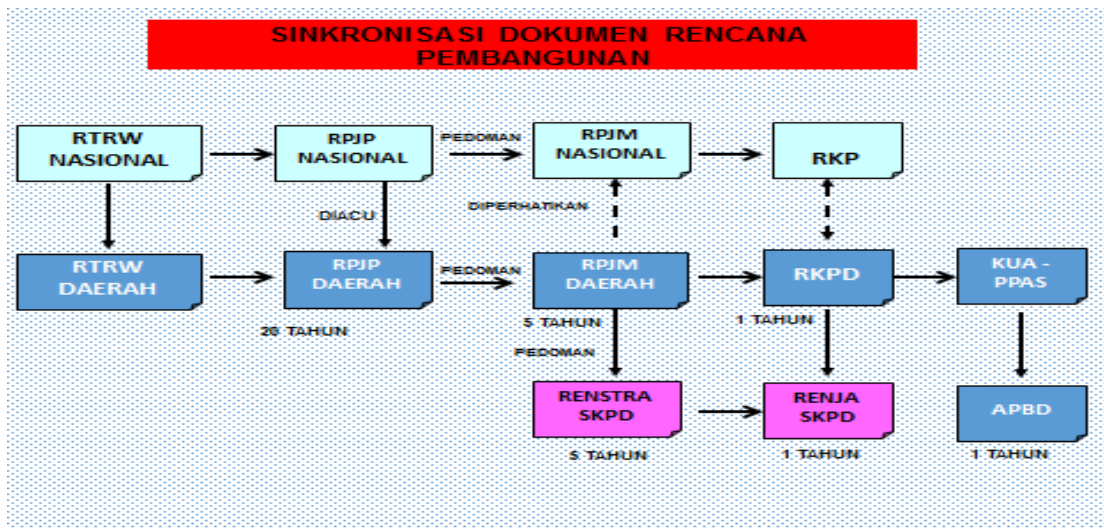
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaiannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kemlagi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri³ Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabapupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Paraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2025;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. SK Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kemlagi Nomor 188.4/28/416- 315/2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2026, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah

untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto . Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD GOVERNMENT .

Adapun *tujuannya* adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2026 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka di dalam Rancangan Akhir Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum 5

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun Yang Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kemlagi pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja pada Kecamatan Kemlagi Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA Rp.
			(Rp)	%	
1	[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.409.340.046,50	2,372,013,971	93.83%	156,014,344
2	[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,939,000	9,844,900	99.05%	94,100
3	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,979,000	6,914,900	99.08%	64,100
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,960,000	2,930,000	98.99%	30,000
5	[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,260,198,000	2,115,324,324	93.59%	144,873,676
6	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,260,198,000	2,115,324,324	93.59%	144,873,676
7	[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
8	[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	105,168,000	101,606,750	96.61%	3,561,250

9	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,617,600	8,596,250	99.75%	21,350
10	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,010,900	10,400,000	94.45%	610,900
11	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,770,000	19,519,000	98.73%	251,000
12	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,972,900	9,857,100	98.84%	115,800
13	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5,184,000		12,000
14	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	30,600,600	28,050,400	91.67%	2,550,200
15	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,000,000	20,000,000	100%	-
16	[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,041,400	2,773,900	91.20%	267,500
17	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	3,041,400	2,773,900	91.20%	267,500
18	[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,649,279	78,516,132	92.75%	6,133,147
19	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,530,319	43,497,172	87.82%	6,033,147
20	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35,118,960	35,018,960	99.72%	100,000

21	[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,032,636	63,947,965	98.33%	1,084,671
22	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,402,300	39,500,450	97.77%	901,850
23	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.000910 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,640,336	19,587,515	99.73%	52,821
24	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,990,000	4,860,000	97.39%	130,000
25	[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26,380,700	25,587,300	96.99%	793,400
26	[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26,380,700	25,587,300	96.99%	793,400
27	[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	26,380,700	25,587,300	96.99%	793,400
28	[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	205,011,005	200,653,900	97.87%	4,357,105
29	[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	205,011,005	200,653,900	97.87%	4,357,105
30	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33,272,850	33,104,800	99.49%	168,050
31	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34,621,100	32,499,000	93.87%	2,122,100

32	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48,142,355	46,802,500	97.22%	1,339,855
33	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	88,974,700	88,247,600	99.18%	727,100
		2.759.420.020	2,372,013,971	94.16%	

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapaian kinerja secara umum terlaksana dengan baik 94,16%, Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.759.420.020,-** terealisasi sebesar **Rp. 2.372.013.971,-** sisa anggaran **Rp. 387.406.049,-**

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*** sebesar **Rp. 144,873,676,-** dikarenakan terdapat 2 orang pegawai yang purna tugas dan 3 jabatan struktural yang masih kosong serta sisa anggaran juga diakibatkan oleh efisiensi penggunaan sumber daya air dan efisiensi pengadaan barang/ jasa.

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2025	
					Target Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sd 2024 (n-2)	Realisasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sd 2024 (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,10%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Realisasi Anggaran PD	94,17%	93,08%	93,10%	94,16%	101,14%	94,17%	91,20%	96,85%
7.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90,10%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

7.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%
7.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	20 orang	17 orang	17 orang	100%	16 orang	16 orang	100%
7.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
7.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
7.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

7.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
7.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ra pat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.02.2.04. 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	28 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.06.2.01. 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	100%

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 dokumen	22 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut :

Tabel 2.4 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	IKM Kecamatan	-	-	95,10	95,60	95,75	83	95,29	95,70	95,75	95,80	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	82,80	84,31	84,32	84,33	82,80	84,31	84,32	84,33	
3	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	-	-	n/a	n/a	90,10%	90,20%	n/a	n/a	90,10%	90,20%	
4	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	93,10%	94,17%	94,18%	94,19%	94,16%	91,20 %	94,18%	94,19%	
5	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	-	-	n/a	n/a	90,10%	90,20%	n/a	n/a	90,10%	90,20%	
6	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti			n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Profesionalitas ASN PD			89,90	85,40	85,30	85,31	85,29	83,27	85,30	85,31	
9	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar			n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	

10	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar			n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
11	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Jumlah laporan koordinasi	-	-	n/a	n/a	28 laporan	30 laporan	n/a	n/a	28 laporan	30 laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Kemlagi diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kemlagi

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Kemlagi bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Kemlagi yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.

- Faktor Kelemahan Organisasi
 1. Kecamatan sering dianggap hanya sebagai instansi pelaksana tugas umum. Berdasarkan analisis kelembagaan, kecamatan kerap kali tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis, sehingga membatasi kemampuannya dalam mendorong pembangunan secara mandiri
 2. Minimnya jumlah pegawai sehingga terdapat beban kerja yang tidak merata

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kemlagi namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Terdapat potensi pengembangan sektor pariwisata berbasis desa
 2. Wilayah Kemlagi membentang dari dataran rendah Sungai Brantas hingga Pegunungan Kendeng, cocok untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan
 3. Adanya program pelatihan *upskilling* dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait membuka kesempatan bagi pekerja mandiri untuk lebih berdaya saing
 4. Peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbuka luas, didorong oleh peningkatan infrastruktur jalan desa dan fasilitas lampu penerangan
 5. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terus ditingkatkan secara langsung memperlancar distribusi hasil bumi dan mobilitas warga
- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi
 1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau baik dalam pelayanan maupun pemantauan wilayah
 2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
 3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Kemlagi yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Kemlagi untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang- undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 31)

Review terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,10%	2.667.870.410	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,10%	2.667.870.410	
			Persentase Realisasi Anggaran PD	94,17%				Persentase Realisasi Anggaran PD	94,17%		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90,10%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90,10%	20.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.599.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	1.599.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	2.900.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	2.900.000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	2.445.193.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	2.445.193.000	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.445.193.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.445.193.000	
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	67.319.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	67.319.500	

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.841.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.841.500	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.837.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.837.100	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	11.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	11.250.000	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.217.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	6.217.500	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000	
17	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.473.400	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.473.400	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6,000,000	

22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	81.958.460,	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	81.958.460,	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	49.149.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	49.149.500	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.808.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	32.808.960	
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	68.900.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	68.900.450	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	37.187.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	37.187.600	

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	27.242.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	27.242.850	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	4.470.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	4.470.000	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	7.445.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	7.445.600	
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	7.445.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	7.445.600	
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	7.445.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	7.445.600	
32	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	172.814.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	172.814.700	
33	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah laporan koordinasi	28 laporan	172.814.700	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah laporan koordinasi	28 laporan	172.814.700	
34	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	23.787.250	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	23.787.250	
35	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	26.495.600	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	26.495.600	

36	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	31.431.650	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	31.431.650	
37	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 dokumen	91.100.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 dokumen	91.100.200	
					2.848.130.710					2.848.130.710	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke I. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Kemlagi melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Kemlagi secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Dalam hal ini OPD Kecamatan Kemlagi mengkoordinasikan kegiatan hibah ternak (sapi Korban) dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Adapun usulan kegiatan tersebut terlampir pada tabel 2.6 dibawah ini ;

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat daerah : Kecamatan Kemlagi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Usulan Hibah Sapi	Kemlagi	-	1	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 1 yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1.**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR	SATUAN	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Indeks	95,70	95,75	95,80	95,85	95,90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84,31	84,32	84,33	84,34	84,35

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan dokumen Perencanaan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - Penyediaan Bahan / Material ;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa[
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.3 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2,848.130.710,00				3.275.100.400,00
7.01	KECAMATAN				2,848.130.710,00				3.275.100.400,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan		90,10%	2.667.870.410,00			90,20%	2.930.100.400,00
		Persentase Realisasi Anggaran PD	-	94,17%	2.667.870.410,00	-		94,18%	2.930.100.400,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		90,10%	4,499,000.00			90,20%	11,000,000.00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.599.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	5,000,000.00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	20 Laporan	2.900.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Laporan	6,000,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		100%	2.445.193.000,00			100%	2.493.200.400,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	16 Orang	2.445.193.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Orang	2.493.200.400.00

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	--	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		85,31	20.000.000,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	-	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		16 Orang	20.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		100%	67.319.500,00			100%	211,000,000.00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	4 Paket	4,841,500.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	7,000,000.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	2 paket	20.837.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Paket	50,000,000.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	6 paket	11.250.000	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Paket	40,000,000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	2 paket	6.217.500	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Paket	8,000,000.00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,700,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	5,400,000.00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	2 paket	15.473.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Paket	20,000,000.00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	12 laporan	6,000,000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	20,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	100%	68.900.450,00			100%	98.500,000.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	12 Laporan	42,104,700.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Laporan	60,000,000.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	12 Laporan	36,408,960.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	38,500,000.00

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		100%	55,850,700.00			-	157,000,000.00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	2 Unit	37,187,600.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	70,000,000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	2 unit	27.242.850,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	75,000,000.00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	12 unit	4,470,000.00	DANA BAGI HASIL (DBH)			0
	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi</i>				DANA BAGI HASIL (DBH)		2 unit	6,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>						12 unit	6,000,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	[Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan]		100%	7.445.600.00	DANA BAGI HASIL (DBH)			40,000,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti		-	7.445.600.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	40,000,000.00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.445.600.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	40,000,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		100%	172.814.700,00			100%	305,000,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi		28 Laporan	172.814.700.00			-	335,000,000.00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	23.787.250.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		8 Dokumen	60,000,000.00

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	26.495.600.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Dokumen	60,000,000.00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	31.431.650.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		7 Dokumen	60,000,000.00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	91.100.200.00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Dokumen	125,000,000.00
J U M L A H					2,848.130.710.00				3.275.100.400,00

BAB IV
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026 Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 disajikan pada table berikut :

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026

KECAMATAN KEMLAGI

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan	90,10%)	Kec Kemla gi	2.667.870.410.00	-	-	-	-	-
						Persentase Realisasi Anggaran PD	94,17%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		90,10%)	Kec Kemla gi	4,499,000.00	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	Kec Kemlag i	1.599.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20 Laporan	Kec Kemlag i	2.900.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		100%	Kec Kemla gi	2.445.193.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		16 Orang	Kec Kemlag i	2.445.193.000,00	-	-	-	-	-

		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		100%	Kec Kemlagi	67.319.500,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Paket	Kec Kemlagi	4,841,500.00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	Kec Kemlagi	20.837.100,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		6 Paket	Kec Kemlagi	11.250.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	Kec Kemlagi	6.217.500	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		1 Dokumen	Kec Kemlagi	2,700,000.00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		2 Paket	Kec Kemlagi	15.473.400,00	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Kec Kemlagi	6,000,000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar		100%	Kec Kemlagi	68.900.450,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Kec Kemlagi	42,104,700.00	-	-	-	-	-

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Kec Kemlagi	41.400.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	Kec Kemlagi	55,850,700.00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	Kec Kemlagi	37,187,600.00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	Kec Kemlagi	27.242.850,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	Kec Kemlagi	4,470,000.00	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan	100%	Kec Kemlagi	16.771.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	Kec Kemlagi	16.771.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	12 laporan	Kec Kemlagi	16.771.000,00	-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec Kemlagi	209.015.000,00	-	-	-	-	-

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah laporan koordinasi		28 laporan	Kec Kemlagi	172.814.700.00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	8 Dokumen	Kec Kemlagi	23.787.250.00	-	-	-	-	-
2		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		4 Dokumen	Kec Kemlagi	26.495.600.00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6 Dokumen	Kec Kemlagi	31.431.650.00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	10 Dokumen	Kec Kemlagi	91.100.200.00	-	-	-	-	-
JUMLAH PAGU APBD 2026									2,848.130.710.00					

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kemlagi dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Kemlagi.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- a. Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- Penyusunan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;

- Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

5.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- Menyelaraskan hasil Renja Kecamatan dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Menyampaikan hasil Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil untuk semester selanjutnya;
- Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Renja. Akhirnya, penyusunan dokumen Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Desember 2025

Plt. Camat Kemlagi



NICKY SOCRATES, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 198404252003121001